



KEGAGALAN INDONESIA DI PEMILIHAN PRESIDEN IPU

Poltak Partogi Nainggolan*

Abstrak

Delegasi DPR RI telah tiga kali mengalami kekalahan dalam pemilihan Presiden IPU. Kekalahan terakhir kali terjadi pada SU ke-131 pada 17 Oktober 2014 di Jenewa, Swiss. Kejadian ini mengulangi SU ke-125 tahun 2011 di Bern dan ke-118 di Jenewa, dan luput dari upaya untuk mempelajari sumber masalah dan menemukan solusi untuk tidak mengulanginya di masa depan. Esai ini menganalisis penyebab kekalahan dari berbagai perspektif ilmiah objektif, yang bersifat saling melengkapi. Diharapkan, dengan antisipasi masalah di lapangan dan persiapan yang lebih baik, momentum yang mendukung dapat diciptakan, sekaligus dapat memenangkan kandidat dari delegasi parlemen Indonesia.

Pendahuluan

Pada 16 Oktober 2014 hasil pemilihan Presiden Uni Parlemen Dunia (IPU) akhirnya dikabarkan dari Jenewa (Geneve), Swiss. Berita yang ditunggu penuh harap dan antusiasme mengalami anti-klimaks. Kandidat Presiden IPU dari DPR RI Nurhayati Ali Assegaf, bersama kandidat dari Australia, Bronwyn Bishop, diberitakan mengalami kekalahan dalam dua putaran pemungutan suara dari rivalnya Saber Chowdhury asal Bangladesh. Di putaran pertama, dari 340 anggota delegasi IPU yang memberikan suara mereka, Nurhayati memperoleh tempat ketiga dengan 76 suara, sedangkan Chowdhury di tempat pertama dengan 108 suara, diikuti oleh Bishop sebanyak 99 suara, sementara Abdulla Shahid

dari Maladewa menjadi juru kunci dengan 57 suara. Tidak adanya calon yang meraih *minimum single majority*, pemungutan suara di putaran kedua dilakukan, diikuti 3 kandidat peraih suara terbanyak, termasuk Nurhayati. Hasilnya, pemilihan putaran kedua ini tetap dimenangkan Chowdhury dengan perolehan suara jauh lebih banyak, yakni 169 suara, sedangkan Bishop dan Nurhayati dengan masing-masing perolehan suara sebanyak 95 dan 57 suara.

Dari hasil putaran pemungutan suara final ini, tampak penurunan suara untuk kandidat dari Indonesia. Kegagalan ini menjadi kegagalan yang ketiga kalinya bagi kandidat asal Indonesia, setelah sebelumnya, kandidat yang sama, Nurhayati, pada tahun 2011, dalam Siang Umum (SU) IPU ke-125

*) *Research professor* untuk masalah-masalah hubungan internasional, *senior specialist* untuk isu politik, demokrasi, keamanan dan *non-traditional security threats* pada bidang Hubungan Internasional, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI). E-mail pptogin@yahoo.com.



di Bern, Swiss, mengalami kekalahan tipis, selisih 7 suara dalam pemilihan Presiden IPU, dari lawannya, Abdelwahad Radi, asal Maroko. Sedangkan kandidat Indonesia sebelum itu, Agung Laksono, yang pernah mencalonkan diri, tidak terpilih, akibat kekalahan telak, 113 suara berbanding 200, dari pesaingannya, Theo Ben Gurirap, asal Namibia, Afrika, dalam SU ke-118 IPU.

Kekalahan ini memunculkan pertanyaan, mengapa kandidat dari Asia, apalagi Indonesia, begitu sulit memenangkan perebutan kursi Presiden IPU? Sejak berdirinya IPU 125 tahun yang lalu, Asia baru sebagian memimpin IPU sebanyak 2 kali saja, sedangkan Afrika sudah 5 kali, Amerika Latin lebih banyak lagi, yaitu 6 kali, dan selebihnya, silih berganti dikuasai negara-negara asal Eropa yang berperan besar dalam merintis pendirian IPU, seperti Perancis, Inggris, Jerman, dan Belgia. Kandidat dari Indonesia selama ini belum ada yang berhasil terpilih, setelah maju dalam 3 kali pemilihan, walaupun Indonesia sejak tahun 1976 sudah mengirimkan secara teratur anggotanya ke Sidang Umum IPU dan sidang-sidang terkait lainnya.

Masalah Persiapan

Pertama-tama harus dikatakan bahwa persiapan memegang peran penting, karena persiapan yang optimal adalah setengah pencapaian tujuan. Posisi Presiden IPU bukan sebagai simbol, tetapi mempunyai peran nyata sebagai Presiden *Governing Council*, yang sebelumnya disebut *Inter-Parliamentary Council*, atau badan pleno pembuat dan penentu kebijakan IPU. Dia memegang tanggung jawab atas efektivitas kerja komisi-komisi tetap dan kelompok kerja IPU, seperti Komisi Perdamaian dan Keamanan Internasional dan berbagai Masalah-masalah terkait PBB seperti masalah-masalah Timur Tengah. Karena itu, Presiden IPU memiliki makna strategis sebagai mitra kerja setara PBB, yang merepresentasikan aspirasi dan kepentingan rakyat sejangad. Buat Indonesia, posisi ini tidak kalah prestise dan manfaatnya sebagai wahana perjuangan kepentingan di dunia internasional.

Persiapan menjadi bertambah penting ketika kita mengetahui bahwa mereka yang maju sebagai kandidat Presiden IPU memiliki pengalaman yang dapat diandalkan dan dijual ke perwakilan rakyat sedunia,

terutama yang berskala internasional. Sebagai konsekuensinya, setiap kandidat membutuhkan tim sukses dan asistensi yang cakap untuk mendukung proses pencalonan sampai pada tingkat pemilihannya. Kemampuan individual anggota tim sukses dan asistensi menjadi vital, terutama pengalaman di lapangan dalam melakukan praktek diplomasi, negosiasi, komunikasi, dan memahami dengan baik dinamika perkembangan politik nasional dan internasional yang berkembang cepat dan dengan segala komplikasinya.

Latar belakang studi dan penguasaan bahasa menjadi sangat penting karena bersifat mendasar dan sangat menentukan keberhasilan diplomasi internasional dalam proses pemilihan seorang Presiden IPU. Kandidat sudah harus menguasai mekanisme kerja, khususnya pemilihan, Presiden IPU, peta permasalahan, serta konstelasi kekuasaan dan politik di dalamnya. Terkait ini, tim sukses dan asistensi yang ada di delegasi grup nasional Indonesia ke IPU, apalagi ke SU pemilihan Presiden IPU, tentu harus disiapkan jauh lebih baik, pembentukan, cara kerja, komposisi, dan kecakapan individualnya, jika ingin meraih target. Pembentukannya harus dilakukan lebih dini dan waktu kerja mereka tidak bisa instan, tetapi jauh lebih lama. Sebab, begitu banyak pekerjaan untuk melakukan pendekatan dan lobi, selain pembuatan materi kampanye kandidat yang tidak bisa lagi bersifat biasa-biasa saja, atau sebaliknya, berlebihan dan tidak realistis. Membuat materi kampanye tidak mudah, karena begitu sulit dan kompleksnya permasalahan umat manusia sejangad.

Dapat dinilai, selama ini, kandidat asal Indonesia belum didukung tim sukses dan tim asistensi yang memadai, dan bahkan mungkin, patut diakui, memang belum ada. Yang baru tampak selama ini adalah upaya pimpinan grup nasional secara resmi mengumumkan pencaloan anggotanya yang akan maju dalam pemilihan Presiden IPU. Pengumuman itu, seperti yang dilakukan melalui sidang AIPA terdekat, sayangnya belum ditindaklanjuti secara optimal. Hal ini bisa disebabkan karena belum adanya pembiayaan yang memadai dan belum munculnya komitmen yang kuat untuk memenangkan seorang anggota grup nasional parlemen Indonesia untuk tampil di forum dunia dan memimpin. Jika

antusiasme dan kebanggaan nasional sudah muncul, hal ini akan sangat membantu proses persiapan, apalagi jika pengumuman pencalonan itu sudah dilakukan sejak awal, beberapa tahun sebelum waktu pemilihan, dan di-*sounding* berulang-ulang dalam berbagai forum internasional, mulai dari *event* yang terdekat di kawasan.

Jika dievaluasi, selama ini persiapannya bersifat dadakan, tanpa kehadiran dan kerja tim sukses dan asistensi yang kuat dan andal. Tidak heran, upaya men-*sounding* lewat SU AIPA di Laos, September lalu, kurang bergema ke mana-mana, padahal di sana hadir mitra dialog non-ASEAN, yang juga anggota IPU, dan diplomat lintas-negara. Setali tiga uang, membuka ajang diplomasi melalui *gala dinner* dengan mengundang diplomat mancanegara di Jakarta, tidak bisa optimal. Karena, cenderung mendadak dan waktunya tidak intensif, sehingga tidak sebanding *cost and benefit*-nya. Secara kritis, perlu dipahami, bahwa diplomasi parlemen berbeda dengan diplomasi melalui jalur pemerintah. Sebab, di negara demokrasi maju, anggota grup nasional parlemen yang mengikuti IPU beragam dan bisa lebih dominan komposisinya yang berasal dari kalangan oposisi. Sehingga, perlu digarisbawahi, menyiapkan penerjemah Bahasa Inggris sebagai bagian dari tim sukses dan asistensi tersebut, tidaklah cukup. Pada era globalisasi dewasa ini, dengan dunia yang semakin terbuka, dibutuhkan orang-orang dengan kemampuan bilingual, dan, bahkan, multilingual. Dapat menyapa delegasi negara lain dengan bahasa nasional mereka akan sangat membantu dalam membangun simpati, dan lebih jauh lagi, meminta dukungan suara. Terlebih, bahasa yang digunakan dalam kegiatan sidang-sidang forum IPU bukan hanya Bahasa Inggris.

Strategi di Lapangan

Absennya para ahli yang menguasai berbagai masalah internasional, serta memiliki kecakapan dan menguasai praktek diplomasi di lapangan, sebagai bagian dari tim sukses dan asistensi, turut berkontribusi pada kegagalan dalam merebut dukungan. Kemudian, perlu jujur dipertanyakan, dan diselidiki, apakah IPU telah menjadi forum yang dianggap penting, dan telah menuntut perhatian tinggi para diplomat KBRI di

mancanegara, terutama Jenewa, dan para petinggi Kemlu? Padahal, di luar perlunya kehadiran persepsi dan komitmen yang sama dan kuat itu, perlu diketahui bahwa peran diplomat RI di Kedubes untuk mendukung sukses dalam terpilihnya seorang kandidat sebagai Presiden IPU saja, tidak cukup. Sekali lagi, dibutuhkan para ahli di lapangan, termasuk politisi dan staf, dengan kapasitas individual yang tinggi, untuk melakukan berbagai pendekatan dan diplomasi secara total. Demikian pula, diperlukan kehadiran figur mitra Kemlu serta anggota DPR RI dan staf pendukungnya yang memiliki semangat dan idealisme yang tinggi sebagai diplomat pejuang, semata-mata untuk mendukung pencapaian kepentingan nasional, yang harus menjadi basis kepentingan negara di fora internasional.

Jadi, sangat dibutuhkan kehadiran tim sukses dan asistensi yang mudah beradaptasi dengan perubahan yang cepat secara langsung di lapangan. Untuk sukses dalam pemilihan Presiden IPU, dibutuhkan para diplomat dan anggota delegasi DPRRI yang memiliki kecakapan mengantisipasi perubahan di kawasan dan dunia internasional, khususnya di SU IPU. Selain itu, dibutuhkan eksistensi anggota delegasi yang memiliki kemampuan memberikan berbagai alternatif untuk memenangkan kandidat dari negaranya. Upaya mencari dukungan suara bisa sulit dan berlangsung sengit, apalagi dalam pemilihan yang bersifat *head to head*.

Soliditas Dukungan

Beberapa pertanyaan berikut dapat membantu dalam mencari jawaban dari kekalahan para kandidat Indonesia di lapangan. Apakah konflik di negara asal calon, antara parlemen dan pemerintah, dalam perkembangan politik kontemporer mereka, sudah selesai? Demikian juga, apakah persoalan perbedaan pendapat dan kepentingan yang hebat di antara individu anggota parlemen delegasi negara mereka sudah dapat didamaikan, sebelum berangkat menuju arena SU IPU dan pemungutan suara? Harus sudah dapat dipastikan bahwa tidak ada lagi sentimen pribadi yang bisa tiba-tiba muncul kembali dan berimbas pada tidak solidnya dukungan dari sesama anggota delegasi DPRRI terhadap kandidat asal Indonesia.

Selanjutnya, patut pula dipertanyakan,

apakah bias jender sudah tidak ada lagi, tereliminasi secara sadar di antara para anggota delegasi DPR RI sehingga siapa pun kandidat yang maju, perempuan atau lelaki, tidak menjadi masalah? Dari perspektif non-Indonesia, juga perlu dipertanyakan, apakah memang sudah tidak ada lagi pengaruh solidaritas primordial (etnik, ras, bahasa, dan keagamaan) dalam pemilihan pemimpin di tingkat dunia? Apakah memang negara-negara dari kelompok geografis Arab, Timur-Tengah, dan Afrika, sudah berpikir demikian liberal dan majunya dalam berpolitik sehingga telah meninggalkan sikap konservatisme mereka dan sangat bersemangat memperjuangkan dan memberikan dukungan suara secara bulat bagi terpilihnya seorang kandidat yang berlatar belakang perempuan? Harus sudah dapat dijawab tim sukses dan asistensi, apakah semua pertanyaan di atas itu telah dipetakan untuk dicarikan solusinya sehingga dukungan suara lebih besar dapat diraih Indonesia?

Penutup

Bagaimanapun, latar belakang, pendidikan, dan aktivitas politik terkini, serta pengalaman lebih luas kandidat turut berpengaruh atas peluang dukungan yang dapat diraihnya. Dalam kondisi dunia yang sudah sangat terbuka, rekam jejak terkini para kandidat di parlemen asal mudah diikuti oleh rekan mereka para anggota parlemen anggota IPU lintas-negara, khususnya untuk menilai sejauh mana komitmen mereka terhadap implementasi demokrasi dan HAM, serta berbagai hasil kesepakatan serta visi dan misi IPU. Posisi kandidat di parlemen selama ini mempunyai pengaruh terhadap peluang yang dimiliki untuk memenangkan pemilihan.

Dalam kenyataannya, para rival kandidat dari Indonesia mempunyai posisi sangat penting di pemerintahan, seperti mantan menteri, PM, Ketua DPR, dan lain-lain. Rival Agung Laksono, Gurirap adalah mantan PM Namibia. Sementara, rival Nurhayati, Bishop adalah Ketua Parlemen Australia, dan Shahid adalah mantan Ketua Parlemen Maladewa. Namun, posisi penting itu semua bukan menjadi jaminan untuk bisa mudah memenangkan pertarungan dalam pemungutan suara. Kasus kekalahan Ketua DPR Agung Laksono pada tahun 2008 adalah contohnya. Nurhayati juga punya pengalaman di berbagai kegiatan forum

IPU dan forum-forum parlemen lainnya, yang bersifat nasional, regional, maupun multilateral. Tetapi, itu saja belum cukup, perlu persiapan dan dukungan yang lebih baik. Anggota delegasi parlemen asal DPR RI tidak boleh berangkat ke ajang kontestasi di fora internasional hanya dengan modal kemampuan dan persiapan yang apa adanya.

Masih ada faktor lain yang harus dievaluasi, antara lain, momentum yang tepat yang tersedia. Momentum turut menentukan, karena kesempatan yang baik sulit terulang lagi, seperti yang terjadi dalam pemungutan suara di SU ke-125 tahun 2011 IPU, di Bern, Swiss. Suara Eropa dan Asia yang sudah bulat berhasil diraih kandidat dari Indonesia menjadi kontraproduktif karena sikap yang belum solid di dalam delegasi DPR RI, sehingga terjadilah kekalahan tipis itu. Hal kecil pun bisa jadi serius, seperti sikap indisipliner. Ketidakhadiran atau keterlambatan pada waktu *voting* bisa berujung pada kekalahan. Karena itu, perlu tim sukses dan asistensi yang terus harus bekerja keras melobi delegasi parlemen negara lain sampai proses penghitungan suara berakhir. Di arena internasional, delegasi harus dapat bertindak produktif dan efektif hasilnya.

Referensi

- “Asia Kembali Gagal Pimpin Uni Parlemen Dunia,” *Republika*, 16 Oktober 2014.
- Barston, R.P. *Modern Diplomacy*. UK: Longman, 1988.
- Beeridge, G.R. *Diplomacy: Theory and Practice*. New York: Prentice-Hall, 1995.
- Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI. *Diplomasi DPR: Dari Senayan ke Kancah Global*. Jakarta: BKSAP, 2009.
- Nainggolan, Poltak Partogi. *Parlemen dan Hubungan Internasional*, Jakarta: P3DI, 2013.
- _____. *Kinerja DPRRI dalam Inter-Parliamentary Union (IPU)*. Jakarta: P3DI, 2000.
- Newsom, David D. *Dimensi Publik Politik Luar Negeri* (terjemahan dari *Public Dimension of Foreign Policy*). Bandung: Angkasa, 1996.
- “Sidang Parlemen Dunia: Indonesia Gagal Lagi Memimpin,” *Kompas*, 17 Oktober 2014.